

**PENDEKATAN AGRIBISNIS DALAM PENGEMBANGAN
PERTANIAN LAHAN KERING *)
(Kasus Lahan Kering di Kabupaten Buleleng, Bali)**

MADE ANTARA

Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis
Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar-Bali

ABSTRACTS

Agribusiness has been a new discourse in development of agriculture and economics in Indonesia. Implementation of agribusiness concept promise many kind of positive benefit for development of agriculture and economics, so that every agricultural activity and which related to agriculture always use agribusiness approach.

Development of dry land in East Bali generally and in Buleleng Regency specially with grant support of European economic community (MEE) also use of agribusiness approach, expected can improve prosperity of the farmers in dry land. Therefore, the target of writing of this paper is to present stages and information approach of agribusiness in development of dry land.

From result study and reasoning empirical, so can be told that development of dry land agriculture in east Bali generally and in Buleleng regency specially trough agribusiness approach is a precise and correct steps, because this approach to integrate vertically from upstream activity to downstream and by horizontal among various sectors, so that will be able to create feasible profit for farmers in dry land farming.

In effort to realize development of dry land agriculture through agribusiness approach which has potency to increase of farmer's income and also to eliminate economics gap, need support of political will of government (center, province, and regency) and all of society include Non Governmental Organization (NGO) in Buleleng regency. They can be important actors in its realizing, either through development strategy socialization or also through accompanying of farmer in development of advantage agribusiness and co-operation of agribusiness.

In the end of project require to evaluate by independent institution about project impact of European Economic Community grant toward improving of socio-economic condition of the farmer as target of project with analysis methods of before and after project or with and without project.

Key Words: Agribusiness Approach, Development of Dry Land, Buleleng Regency, European Economic Community Grant

*) Makalah telah disajikan pada seminar pengembangan pertanian di wilayah lahan kering dengan tema "Pengelolaan Wilayah Lahan Kering Beririgasi yang Berkelanjutan dengan Orientasi Agribisnis", yang diselenggarakan oleh 'Sustainable Development of Irrigated Agriculture in Buleleng and Karangasem (SDIABKA) Project Manajemen Unit' bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, tanggal 5 Februari 2004 di Buleleng.

PENDAHULUAN

Menjelang Pelita IV sekitar 1980-an, kata agribisnis tiba-tiba populer dalam wacana pembangunan Indonesia. Masalahnya tentu berawal ketika negara mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran akibat anjloknya harga minyak dan gas bumi. Untuk tetap mempertahankan momentum pembangunan yang konon katanya telah diraih ketika itu, maka berbagai kebijakan pembangunan telah diambil oleh pemerintah Orde Baru. Seluruh masyarakat diminta untuk mengencangkan ikat pinggang alias berhemat-hemat, sementara harga-harga terus merayap naik. Untuk menarik dana dari luar negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan 1 Juni 1983 dalam bidang Perbankan dan reformasi pajak, yang tak lain merupakan upaya memobilisasi dana masyarakat melalui sektor anggaran. Tak pelak lagi perekonomian yang mengapung di atas minyak dan gas bumi tak bisa dipertahankan terus. Akhirnya kita sepakat mencari jalan terobosan lain yakni mencari alternatif komoditi ekspor lain untuk mengganti atau sekurang-kurangnya mengambil sebagian peranan minyak dan gas bumi sebagai penghasil devisa selama ini. Akhirnya berpalinglah kita kepada bidang agribisnis yang dahulu memang kurang mendapat perhatian periode kejayaan minyak.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberi prioritas tertinggi bagi penanaman modal di bidang agribisnis. Bahkan tidak kurang pada kunjungan resmi beberapa pejabat Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka promosi penanaman modal, dalam Daftar Skala Prioritas Investasi, bidang agribisnis menduduki urutan pertama dari empat jenis proyek yang ditawarkan kepada pemilik modal di AS. Memang menggiatkan bidang agribisnis bukan satu-satunya terobosan yang ditawarkan, tetapi satu alternative yang setidaknya dari sana diharapkan dalam jangka menengah dan jangka panjang mampu memperingan keadaan.

Krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak Juli 1997, telah menyebabkan perekonomian Indonesia porak-poranda. Depresiasi nilai rupiah atau apresiasi dollar dari Rp 2400/\$ tahun 1996 menjadi Rp 15.000/\$ tahun 1998 telah menyebabkan inflasi sampai mencapai 75 persen tahun 1998, pendapatan riil masyarakat menurun drastis, paberik-paberik yang berbahan baku impor banyak yang tutup, pengangguran meningkat luar biasa dan jumlah rakyat miskin bertambah banyak. Namun di balik krisis yang menimpa perekonomian Indonesia, ada satu sektor yang masih tetap tegar, bahkan berjaya karena

menanggung berkah dari situasi krisis yakni sektor agribisnis dengan jantung penggerakannya adalah sektor pertanian dalam arti luas. Depresiasi nilai rupiah menyebabkan produk-produk agribisnis Indonesia sangat kompetitif di pasar Internasional dan harga-harga di dalam negeripun ikut merayap naik sampai mencapai 5 kali lipat dari harga sebelum krisis. Petani dan pelaku-pelaku agribisnis lainnya meraih keuntunagan luar biasa. Bahkan ada celetukan yang bernada guyon dari mereka, “mudah-mudahan krisis ekonomi tidak cepat berlalu”.

AGRIBISNIS: SUATU KONSEP SISTEM

Selama PJP I dapat dikatakan bahwa kita melihat pertanian secara sangat sempit, semata-mata pada subsistem produksi atau usahatani saja. Cara pandang lama ini telah berimplikasi tidak menguntungkan bagi pembangunan pertanian dan pedesaan yakni pertanian dan pedesaan hanya sebagai sumber produk primer yang berasal dari tumbuhan dan hewan tanpa menyadari potensi bisnis yang sangat besar yang berbasis produk-produk primer tersebut.

Agribisnis bukan masalah kecil dan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan pekerjaan, mengembangkan pembangunan daerah, sumber devisa yang besar. Dalam agribisnis sudah tersirat perubahan struktur perekonomian dari pertanian ke industri. Jadi pengembangan agribisnis dalam PJP II sangat cocok sekali dengan Trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Apabila agribisnis berhasil, maka sebagian pekerjaan besar untuk melaksanakan Trilogi pembangunan sudah diselesaikan sebagai bangsa dan Negara.

Esensinya, agribisnis merupakan cara baru melihat pertanian. Dulu pertanian dilihat secara sektoral, sekarang harus dilihat secara intersektoral. Dulu pertanian dilihat secara subsistem, sekarang harus dilihat secara sistem. Dulu pertanian berorientasi produksi, maka sekarang pertanian harus berorientasi bisnis. Apabila agribisnis usahatani atau produksi dianggap sebagai subsistem, maka ia tidak terlepas dari kegiatan atau subsistem agribisnis non usahatani seperti subsistem pengolahan (agroindustri hulu dan hilir), subsistem pemasaran input-output dan subsistem lembaga penunjang. Untuk itu, agribisnis jangan dicari ke mana-mana karena agribisnis hanya cara baru melihat pertanian, inilah visi ke depan pembangunan pertanian, termasuk pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Buleleng dan Karangasem.

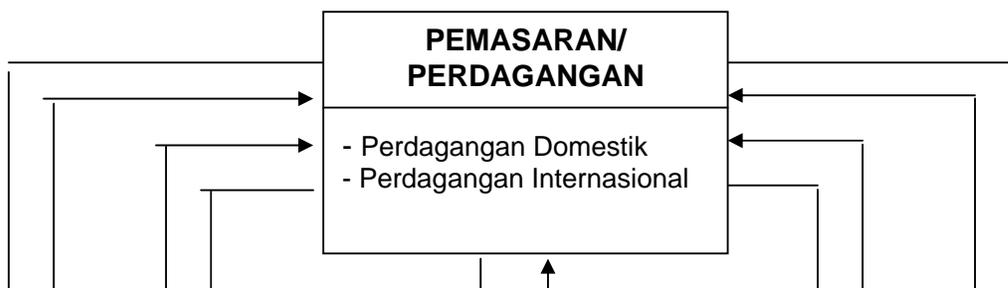
Agribisnis dalam pengertian seperti tersebut menunjukkan adanya keterkaitan vertikal antar subsistem dan keterkaitan horizontal dengan subsistem lain di luar pertanian, seperti jasa-jasa (finansial dan perbankan, koperasi, transportasi, perdagangan, pendidikan dan lain-lain). Keterkaitan luas ini sudah disadari sejak dahulu oleh ekonom pasca-revolusi industri, sehingga mereka menekankan arti strategis penempatan pertanian (dan pedesaan) sebagai bisnis inti (*core business*) pada tahap pembangunan sebelum lepas landas terutama dalam kaitannya dengan proses industrialisasi.

Definisi Agribisnis:

Agribisnis berasal dari kata *Agribusiness*, di mana *Agri=Agriculture* artinya pertanian dan *Business* artinya usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi secara sederhana Agribisnis (*agribusiness*) didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan pertanian dan terkait dengan pertanian yang berorientasi profit.

Jika didefinisikan secara lengkap agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian (Davis and Golberg, 1957; Downey and Erickson, 1987; Saragih, 1998).

Apabila mata rantai kegiatan agribisnis dipandang dalam suatu konsep sistem, maka mata rantai kegiatan tersebut dapat dipilah-pilah menjadi empat subsistem yaitu: (1) subsistem produksi (on-farm), (2) subsistem pengolahan (agroindustri hulu dan hilir)(off-farm), (3) subsistem pemasaran/perdagangan (off-farm), dan (4) subsistem lembaga penunjang (off-farm)(Gambar 1). Keempat subsistem ini mempunyai kaitan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu subsistem atau kegiatan akan berpengaruh terhadap subsistem atau kelancaran kegiatan dalam bisnis.



Gambar 1. Sistem Agribisnis

= keterkaitan dua arah (saling menunjang/membutuhkan/terkait)

Dengan demikian bidang agribisnis merupakan kegiatan lebih dari sekedar pertanian, karena di dalamnya mencakup kegiatan-kegiatan lain yang mewakili sektor di luar pertanian. Oleh karenanya penting disadari bahwa setiap usaha untuk

melakukan analisis sektoral bagi subsistem baru akan memiliki makna dan memberikan peranan yang bermanfaat apabila dikaitkan satu sama lain dan berorientasi pada konsep sistem. Memahami timbulnya kaitan antara tiap subsistem, siapa pelaku dalam tiap subsistem, dan bagaimana teknologi yang digunakan merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi agribisnis dan mencari alternatif pemecahannya.

Namun patut diingat bahwa subsistem usahatani atau produksi adalah jantung penggerak agribisnis. Apabila subsistem produksi (usahatani) dikembangkan atau dimodernisasi, maka akan timbul kaitan ke belakang (*backward linkages*) berupa peningkatan kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kaitan ke belakang ini mengundang perorangan atau perusahaan untuk menangani masalah input produksi (usahatani) dengan berpedoman pada 4-tepat, yaitu tepat waktu, tempat, jumlah dan kualitas. Ketepatan dalam melaksanakan empat hal ini akan sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga penunjang agribisnis, seperti kelancaran angkutan, ketersediaan lembaga kredit dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Produk pertanian tergantung pada musim (*seasonal*), menyita banyak ruangan untuk menyimpannya (*bulky*), tidak tahan lama sehingga harus segera dikonsumsi atau diolah menjadi produk yang dapat disimpan (lekas rusak). Peningkatan produksi usahatani dan menyiasati ketiga kelemahan produk pertanian, maka perlu dilakukan pengolahan. Pengolahan produk disebabkan juga oleh permintaan konsumen di dalam dan di luar negeri yang semakin menuntut persyaratan kualitas dan diversifikasi produksi olahan bila pendapatan mereka meningkat. Jadi modernisasi sektor produksi (usahatani) akan menimbulkan kaitan ke depan (*forward linkages*).

Dalam agribisnis yang telah berkembang, terdapat pembagian tugas yang mendasar antara berbagai fungsi. Semakin dalam peranan teknologi masuk ke dalam agribisnis, semakin kompleks sifat kegiatan dalam tiap subsistem sehingga diperlukan adanya diferensiasi tugas yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang berbeda. Ada petugas yang bertanggung jawab terhadap produksi, lainnya terhadap pemasaran atau penjualan, lainnya lagi terhadap personalia. Kehadiran pelaku-pelaku baru dari luar kelompok pelaku yang telah ada disebut kaitan ke luar (*outside linkages*). Kelompok baru ini dapat memberikan pengaruh positif apabila dapat mengurangi pemusatan kekuatan ekonomi di satu tangan. Sebaliknya, kaitan ini mempunyai pengaruh negatif apabila merugikan kelompok pelaku yang telah ada.

Misalnya menimbulkan berkurangnya imbalan atau bagian keuntungan yang diterima oleh salah satu subsistem. Kasus, agribisnis komoditi Cengkeh di era Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). BPPC telah menguntungkan lembaganya sendiri (subsistem pemasaran) dan merugikan subsistem lainnya yakni petani (subsistem produksi) dan paberik rokok (subsistem agroindustri). Dalam hal ini BPPC telah berlaku sebagai monopsoni (pembeli tunggal) cengkeh petani dengan penetapan harga rendah yang berarti merugikan petani, dan juga berlaku sebagai monopoli (penjual tunggal) ke paberik rokok dengan menetapkan harga tinggi sehingga merugikan paberik rokok. Selisih harga dari penjualan dengan harga tinggi ke paberik rokok dan pembelian dengan harga rendah dari petani cengkeh telah menyebabkan BPPC memperoleh margin pemasaran sangat tinggi, yang hanya menguntungkan BPPC dan PUSKUD sebagai rekanan pembelian. Jadi sistem agribisnis komoditi cengkeh yang hanya menguntungkan satu subsistem yakni subsistem pemasaran (BPPC) telah membuat resah subsistem lainnya yang merasa dirugikan, sehingga akhirnya di era reformasi BPPC dibubarkan. Ini sebagai bukti empirik bahwa semua subsistem atau pelaku-pelaku dalam sistem agribisnis harus diuntungkan.

STRUKTUR PEREKONOMIAN DAN POTENSI LAHAN KERING

Struktur Perekonomian Kabupaten Buleleng

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Demikian halnya struktur ekonomi Kabupaten Buleleng dapat diketahui dari kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Buleleng. Mencermati data PDRB Kabupaten Buleleng menurut harga berlaku selama enam tahun terakhir (1997-2002), maka dapat diketahui bahwa struktur ekonomi Kabupaten Buleleng masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas (pertanian pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan) yang ditunjukkan oleh kontribusi sektor ini berkisar dari 26,89% s.d.30,56%, atau sebesar 29,69% terhadap total PDRB Kabupaten Buleleng tahun 2002, mengalami penurunan dari 30,11% tahun 1997. Sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa lainnya mewarnai aktivitas ekonomi di Buleleng dengan kontribusi masing-masing sebesar 24,85% dan 22,77% terhadap PDRB tahun 2002. Berikutnya yang cukup menonjol

adalah kontribusi sektor industri pengolahan, memiliki kontribusi sebesar 9,91% terhadap PDRB Buleleng tahun 2002 (Tabel 1).

Dari informasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa, perekonomian Kabupaten Buleleng tampaknya sedang mengalami proses transformasi struktural dari corak agraris ke aktivitas jasa-jasa, baik jasa perdagangan, hotel dan restoran maupun jasa-jasa lainnya. Hal ini didukung oleh fakta empirik yakni jasa pariwisata dan yang terkait dengan pariwisata semakin berkembang di Kabupaten Buleleng yang memiliki kontribusi relatif signifikan terhadap aktivitas perekonomian Kabupaten Buleleng.

Walau perekonomian Buleleng sedang mengalami transformasi struktural dari ekonomi pertanian ke ekonomi jasa, sektor pertanian harus tetap memperoleh perhatian pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat, yang dilandasi oleh beberapa argumentasi: (1) Sektor pertanian di Kabupaten Buleleng sebagai sumber nafkah sebagian besar penduduk, (2) Sektor pertanian sumber pangan, baik pangan karbohidrat, protei maupun vitamin dan mineral, (3) Sektor pertanian sumber devisa, utamanya produk-produk perkebunan lahan kering, seperti kopi, kakao, vanili, tembakau, mete, dll., (4) Sektor pertanian sumber bahan baku industri pertanian (agroindustri), (5) Sektor pertanian berperan sebagai penyangga perekonomian, ketika sektor jasa pariwisata yang sangat rentan terhadap isu sensitif sosial, politik dan keamanan mengalami kebangkrutan, seperti dalam tahun 2003 akibat tragedi Bom Kuta, (6) Sektor pertanian ikut melestarikan sumberdaya alam, seperti konservasi lahan dengan tanaman perkebunan, sawah yang diterasering, dll. Dari beberapa argumen di atas, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengurangi perhatian terhadap sektor pertanian. Bahkan potensi lahan kering di Buleleng Barat dan Timur yang dimiliki agar digali, sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan dan mampu menciptakan pendapatan lebih tinggi kepada petani.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997-2002 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	342.262,5 (30,11)	508.546,15 (30,56)	514.451,31 (28,86)	542.721,02 (26,89)	631.172,24 (27,28)	808.547,79 (29,69)
2	Pertambangan dan Penggalian	10.978,84 (0,97)	14.330,04 (0,86)	14.534,96 (0,82)	16.343,56 (0,81)	18.415,47 (0,80)	20.855,20 (0,77)
3	Industri Pengolahan	93.852,68 (8,26)	166.344,10 (10,00)	176.175,04 (9,88)	195.334,75 (9,68)	230.017,86 (9,94)	269.920,39 (9,91)
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	10.168,81 (0,89)	11.618,73 (0,70)	14.589,86 (0,82)	15.718,56 (0,78)	17.221,50 (0,74)	19.187,45 (0,70)
5	Bangunan	34.676,15 (3,05)	46.060,25 (2,77)	48.377,08 (2,71)	52.728,61 (2,61)	60.932,79 (2,63)	71.404,06 (2,62)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	309.006,50 (27,19)	437.754,50 (26,31)	478.995,87 (26,87)	558.775,85 (27,69)	618.305,66 (26,73)	676.577,49 (24,85)
7	Pengangkutan dan Komunikasi	49.892,27 (4,39)	58.492,83 (3,52)	61.664,21 (3,46)	72.097,84 (3,57)	95.350,83 (4,12)	117.191,44 (4,30)
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	46.358,47 (4,08)	36.156,10 (2,17)	56.201,69 (3,15)	87.911,14 (4,36)	103.248,85 (4,46)	119.110,44 (4,37)
9	J a s a - j a s a	239.365,47 (21,06)	384.690,41 (23,12)	417.325,07 (23,41)	476.633,14 (23,62)	538.870,45 (23,39)	620.122,66 (22,77)
	PDRB	1.136.561,69 (100,00)	1.663.993,11 (100,00)	1.782.315,09 (100,00)	2.018.264,47 (100,00)	2.313.535,65 (100,00)	2.722.916,92 (100,00)

Sumber : 1) Anonim (2002), PDRB Bali 1997-2001

2) Anonim (2003), PDRB Bali 1998-2002

(.....) = Persen = Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Buleleng.

Potensi Lahan Kering di Kabupaten Buleleng

Potensi lahan kering yang diuraikan di bawah adalah iklim, tataguna lahan, jenis tanah, jenis tanaman dan ternak, sbb.:

Iklim

Kabupaten Buleleng beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1.300 mm dengan jumlah rata-rata hari hujan 65 kali setahun. Curah hujan di sini banyak ditentukan oleh ketinggian tempat. Curah hujan terendah terdapat di daerah pantai dan yang tertinggi ada di daerah pegunungan. Musim hujan berkisar antara bulan Oktober-April dengan puncaknya pada bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai dari bulan April-Oktober dengan bulan terkering sekitar bulan Agustus-September. Khusus untuk Buleleng Timur curah hujan berkisar antara 1050-2000 mm per tahun.

Tataguna Lahan

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali. Secara geografis terletak pada posisi 8°03'40"-8°23'00" LS dan 114°25'55" – 115°27'28" BT. Kabupaten Buleleng berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Karangasem di bagian Timur, Kabupaten Jembrana di bagian Barat dan Kabupaten Tabanan, Badung dan Kabupaten Bangli di bagian Selatan.

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Buleleng 1.365,88 km² atau 136.588 Ha. Dari luas tersebut, 91,38% (124.819 Ha) adalah lahan kering, 8,40% (11.472 Ha) adalah lahan sawah dan 0,22% (297 Ha) adalah lahan lainnya (Tabel 2). Data dan informasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi pertanian, utamanya potensi pertanian lahan kering yang besar, tersebar di Buleleng Barat dan Buleleng Timur. Namun keterbatasan air menjadi kendala utama dalam menggali potensi lahan kering di Kabupaten Buleleng. Sementara ini pemanfaatan lahan kering hanya mengandalkan air hujan, sehingga pemanfaatannya dapat dikatakan belum optimal. Dengan adanya proyek '*Sustainable Development of Irrigated Agriculture in Buleleng and Karangasem (SDIABKA)*', yang merupakan Grant Masyarakat Ekonomi Eropah (MEE), diharapkan pemanfaatan lahan kering di Kabupaten Buleleng menjadi optimal dan pendapatan petani setempat dapat ditingkatkan.

Tabel 2. Tataguna Lahan di Kabupaten Buleleng, Tahun 2001

Penggunaan lahan			Luas (Ha)	
1	Lahan Sawah		11.472	8,40
	1.1.	Pengairan Teknis	0	-
	1.2.	Pengairan Setengah Teknis	9.457	6,92
	1.3.	Pengairan Sederhana Pekerjaan Umum	848	0,62
	1.4.	Pengairan Tradisional	704	0,52
	1.5.	Tadah Hujan	463	0,34
	1.6.	Pasang Surut	0	-
	1.7.	Lebak	0	-
	1.8.	Polder Dam Lainnya	0	-
2	Bukan Lahan Sawah		125.116	91,60
	A	Lahan Kering	124.819	91,38
	2.1 .	Pekarangan Rumah dan Sekitarnya	4.761	3,49
	2.2.	Tegal/Kebun	37.092	27,16
	2.3.	Padang Rumput	0	-
	2.4.	Hutan Negara	48.679	35,64
	2.5.	Perkebunan	29.225	21,40
	2.6.	Hutan Rakyat	891	0,65
	2.7.	Tanah yang Sementara Tidak Diusahakan	58	0,04
	2.8.	Ladang	0	-
	2.9.	Lain-lain	4.113	3,01
	B	Lahan Lainnya	297	0,22
	2.10.	.Rawa-rawa	0	-
	2.11.	Tambak	295	0,22
	2.12.	Kolam	2	0,00
	Jumlah		136.588	100,00

Sumber: Anonim (2002).

Jenis Tanah

Jenis tanah Pulau Bali Umumnya didominasi oleh regosol dan latosol dan sebagian kecil alluvial, mediteran dan andosol. Tanah regosol yang ada di Bali seluas 224.869 hektar (44%), tersebar dari bagian utara (Buleleng), bagian tengah (Petang) hingga ke bagian timur wilayah sekitar Abang. Berdasarkan atas peta tanah Pulau Bali, wilayah Buleleng Timur sebagian besar mempunyai jenis tanah regosol. Sedangkan tingkat kesuburan termasuk sedang dan sebagian lahan di daerah ini ditutupi oleh pasir/material hasil letusan Gunung Agung.

Jenis Tanaman dan Ternak

Potensi komoditi pertanian dalam arti luas di Kabupaten Buleleng antara lain: tanaman pangan (padi sawah, palawija), hortikultura (anggur, mangga, rambutan, durian, jeruk, dll), perkebunan rakyat (kopi, cengkeh, vanili, pisang, dll), peternakan (sapi, kambing, ayam kampung, dll), perikanan laut dan perikanan darat/air payau (lihat Antara dkk., 2002). Namun dari hasil observasi di wilayah

Buleleng Timur, utamanya Kecamatan Tejakula dan Tianyar serta Kubu, maka jenis tanaman pangan yang sedang diusahakan oleh petani setempat yaitu: ketela rambat, ketela pohon dan jagung. Jenis tanaman tahun atau perkebunan yaitu: kelapa, rontal, rambutan, mangga, kakao, mete dan sawo. Sedangkan jenis ternak yang diusahakan adalah sapi, babi dan ayam kampung.

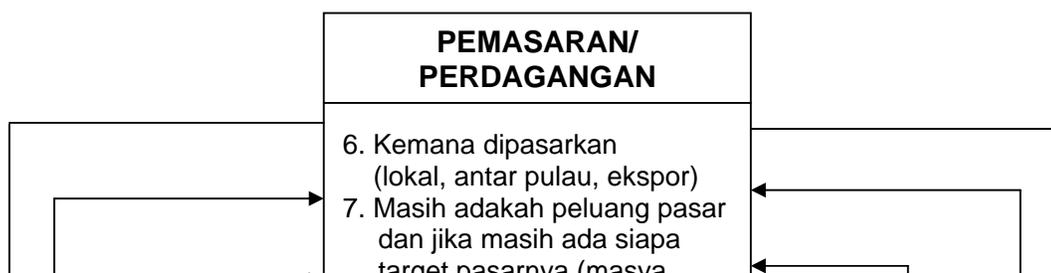
Dari berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh petani setempat, tidak semuanya bernilai ekonomi tinggi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi melalui analisis usahatani komparatif, jenis-jenis tanaman mana saja yang bernilai ekonomi tinggi yang secara signifikan mampu meningkatkan pendapatan petani dan perlu pula dilakukan eksperimentasi-eksperimentasi jenis-jenis tanaman inovatif yang memiliki potensi dikembangkan dengan adanya irigasi sumur bor, sehingga nantinya tampak jelas dampak dari proyek irigasi sumur bor ini.

PENDEKATAN AGRIBISNIS DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PERTANIAN LAHAN KERING

Pengembangan pertanian lahan kering menggunakan pendekatan agribisnis, berarti para perencana pengembang pertanian lahan kering harus berpikir secara kesisteman. Artinya, agar berhasil mengembangkan pertanian lahan kering termasuk di dalamnya berhasil meningkatkan pendapatan petani, maka para perencana tidak hanya memikirkan pengembangan subsistem usahatani atau produksi saja, tetapi juga memikirkan pengembangan subsistem-subsistem lainnya yang menunjang keberhasilan subsistem usahatani tersebut. Oleh karena itu, para perencana harus memikirkan pengembangan keempat subsistem agribisnis secara simultan dan terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir dan secara horizontal antara berbagai sektor, sehingga akan mampu menciptakan profit yang layak bagi petani di lahan kering. Paradigma baru ini berbeda nyata dengan paradigma lama pembangunan pertanian yang terbatas pada pembangunan subsistem produksi atau usahatani, yang hanya berorientasi pada peningkatan produksi.

Secara umum, tahapan pengembangan pertanian lahan kering dengan pendekatan agribisnis (lihat Gambar 2) adalah sebagai berikut:

1. Lakukan evaluasi potensi wilayah, al.: kondisi fisik dan kesuburan lahan, kondisi agroekosistem, dll.;
2. Identifikasi jenis tanaman dan ternak yang telah ada dan baru yang cocok dikembangkan di wilayah tersebut dan bagaimana sistem irigasinya, apakah irigasi sumur bor dengan sistem perpipaan atau irigasi tetes (*drip irrigation*) atau hanya mengandalkan tadah hujan;
3. Adakah tersedia sarana produksi dan teknologi, seperti benih, pupuk, pakan, pestisida, alat dan mesin (alsintan), obat-obatan yang dibutuhkan jika mengusahakan tanaman dan ternak pada butir 2. Jika tersedia apakah terjangkau oleh petani setempat ?;
4. Bagaimana dengan pasca panennya. Apakah teknologinya dikuasai atau belum. Jika belum perlu dicari tahu teknologi pasca panennya;
5. Apakah mungkin kelak produksinya diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Jika mungkin bagaimana dengan penguasaan teknologinya. Jika belum dikuasai perlu dicari tahu tentang teknologi pengolahannya;
6. Kemana kelak produksinya dipasarkan, apakah pasar lokal, antar pulau, atau ekspor;
7. Masih adakah peluang pasar dan jika ada siapa target pasarnya (masyarakat umum, wisatawan) atau kelas bawah, menengah atau kelas atas;
8. Adakah strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan terhadap competitor produk sejenis;
9. Tersediakah prasarana penunjang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, terminal, alat transportasi yang melancarkan pengaliran produk dari petani ke pasar atau konsumen;
10. Adakah kelembagaan penunjang, seperti lembaga perkreditan, lembaga penyuluhan, kelompok tani, lembaga penelitian, peraturan/kebijakan pemerintah yang kondusif, koperasi, dll.;



Gambar 2. Pendekatan Agribisnis dalam Pengembangan Pertanian Lahan Kering

11. *The last but not least*, bersediakah petani diajak melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya lahan kering yang dimilikinya. Jika tidak atau belum tersedia, lakukan proses penyadaran secara terus-menerus pentingnya melakukan inovasi demi meningkatkan produktivitas dan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di sini proses penyuluhan memegang peranan penting. Belajarlah dari sukses swasembada beras selama pemerintahan Orde Baru, yang mampu merubah sikap mental petani padi menjadi *innovation minded*.

Dalam tahap perencanaan pengembangan, pertanyaan-pertanyaan di atas harus dicari jawabannya dan jika sudah terjawab, maka lakukanlah implementasi dari rencana tersebut dengan langkah-langkah seperti tersebut di atas.

Dengan tahapan dan mekanisme seperti itu, maka pengembangan pertanian lahan kering dengan pendekatan agribisnis akan mampu mengintegrasikan perekonomian wilayah Kabupaten Buleleng, baik antar wilayah Buleleng Timur, Tengah, Barat dan perekonomian Bali Selatan maupun antara sektor pertanian dengan sektor industri/agroindustri, sektor pertanian dengan sektor jasa, dan sektor industri dengan sektor jasa penunjang. Selain itu, melalui mekanisme pasar, pengembangan pertanian lahan kering dengan pendekatan agribisnis akan mampu memperkecil pelarian sumberdaya manusia dan pelarian modal dari wilayah Buleleng Bagian Timur ke wilayah Buleleng Tengah dan Barat atau ke luar Buleleng, bahkan potensial mendorong terjadinya penarikan kembali sumberdaya manusia dan kapital dari wilayah lain ke wilayah Buleleng Timur.

Agar proses demikian terjadi, maka komoditi yang dikembangkan di wilayah Buleleng Timur hendaknya merupakan komoditi/produk yang bersifat memiliki elastisitas permintaan terhadap perubahan pendapatan yang tinggi (*income elastic demand*), seperti komoditi peternakan dan hortikultura. Konsumsi peternakan (daging dan susu) dan hortikultura meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tampaknya untuk lahan kering di wilayah Buleleng Timur sangat potensial dikembangkan komoditi hortikultura dan peternakan. Masih ingatkah kejayaan jeruk keprok di Buleleng Timur, secara luar biasa mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat di wilayah ini. Dengan demikian seiring bertumbuhnya ekonomi Bali Selatan atau Propinsi-Propinsi di Jawa, maka akan meningkatkan permintaan komoditi peternakan dan hortikultura dan akhirnya akan

membangkitkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Buleleng Timur dan Karangasem.

Kemudian untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah Buleleng Timur yang umumnya adalah petani lahan kering, maka para petani perlu didorong dan difasilitasi untuk mengembangkan koperasi agribisnis. Di masa lalu, aktivitas ekonomi petani kita hanya terbatas pada usahatani saja, yang justru paling kecil nilai tambahnya dibandingkan dengan nilai tambah agribisnis hulu dan hilir. Dengan mengembangkan koperasi agribisnis secara vertikal, maka petani akan dapat menangkap nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis tersebut atau dengan kata lain nilai tambah tidak jatuh ke luar wilayah Buleleng Timur. Dengan demikian, pendapatan petani di wilayah Buleleng Timur akan dapat ditingkatkan dan mengejar ketertinggalan dari wilayah Buleleng Barat.

Lembaga penunjang berwujud organisasi seperti perbankan atau lembaga keuangan diperlukan sebagai penyedia pembiayaan kegiatan usaha agribisnis, baik pada subsistem produksi, subsistem agroindustri maupun pada subsistem pemasaran. Lembaga penelitian yang menghasilkan inovasi dan paket-paket teknologi untuk menunjang subsistem produksi. Lembaga penyuluhan diperlukan untuk menginformasikan hasil-hasil penelitian dari lembaga penelitian, teknologi baru, perkembangan harga pasar berbagai produk agribisnis. Jadi keberadaan lembaga-lembaga penunjang sangat vital dalam menunjang keberhasilan pengembangan lahan kering di Kabupaten Buleleng menggunakan pendekatan agribisnis.

Pemerintah sebagai organisasi negara yang memiliki tanggung jawab besar memajukan agribisnis, dapat berperan dalam menciptakan, mengadakan, memantapkan atau memberdayakan subsistem kelembagaan, baik lembaga penunjang sarana dan prasarana maupun lembaga organisasi. Pemerintah bertanggung jawab membangun dan menyediakan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi. Pemerintah dapat membangun dan memberdayakan lembaga penelitian yang menunjang pengembangan agribisnis, memberdayakan perbankan agar menaruh kepedulian terhadap kebutuhan permodalan para pelaku agribisnis dan menciptakan peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan dalam bentuk Kepres, Kepmen, Kepgub, Kepbup yang bersifat kondusif terciptanya iklim investasi dan produktif mendukung pengembangan agribisnis. Oleh karena itu, pemerintah mestinya bukan menjadi aktor agribisnis, tetapi menjadi promotor, fasilitator dan regulator pengembangan agribisnis.

Bila peran pemerintah sebagai fasilitator dan promotor dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konkrit, pengembangan agribisnis akan dapat berjalan lebih cepat dan pendapatan pelaku agribisnis, seperti petani lahan kering akan dapat ditingkatkan.

CATATAN PENUTUP

1. Pengembangan pertanian lahan kering, utamanya di Kabupaten Buleleng dan Karangasem melalui pendekatan agribisnis adalah suatu langkah yang benar dan tepat (*on the right track*), karena pendekatan ini mengintegrasikan secara vertikal dari aktivitas hulu ke hilir dan secara horizontal antara berbagai sektor, sehingga akan mampu menciptakan profit yang layak bagi petani di lahan kering.
2. Dalam usaha mewujudkan pengembangan pertanian lahan kering melalui pendekatan agribisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani sekaligus menghilangkan kesenjangan ekonomi, perlu dukungan keinginan politik (*political will*) dari pemerintah (pusat, propinsi dan kabupaten) dan masyarakat luas termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Buleleng. Mereka dapat menjadi aktor penting dalam mewujudkannya, baik melalui sosialisasi strategi pengembangan maupun melalui pendampingan petani dalam pengembangan agribisnis unggulan dan koperasi agribisnis.
3. Di akhir proyek perlu dilakukan evaluasi oleh institusi independent. dampak proyek hibah MEE terhadap kondisi sosial-ekonomi petani sasaran proyek dengan metode *before and after project* atau *with and without project*.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2002. 'Bali Dalam Angka 2001'. Badan Pusat Statistik Propinsi Bali.

- Anonim. 2002. 'Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Bali, 1997-2001'. Bappeda Propinsi Bali Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Bali
- Anonim. 2003. 'Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Bali, 1998-2002'. Bappeda Propinsi Bali bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Propinsi Bali
- Antara, M; Sukaatmaja, P; Sunarta, N dan Heny Urmila Dewi, M. 2002. 'Profil Investasi Buleleng Timur'. Kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Bali dan LPPP Program Studi Pariwisata UNUD.
- Davis, H.J. and R.A. Golberg. 1957. 'A Concept of Agribusiness'. Harvard Graduate School of Business Administration. Boston, Massachusetts.
- Downey, W.D and Erickson, S.P. 1987. 'Agribusiness Managemen'. Mc Graw-Hill, Inc, New York. Second Edition.
- Saragih, B. 1998. 'Agribisnis, Pardigma Baru Pembangunan EKonomi Berbasis Pertanian'. Penerbit Yayasan Mulia Persada Indonesia dan PT. Surveyor Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan, Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.